



**Nusantara Journal of Economics (NJE)**

Tersedia online di <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/nje>

Vol. 02, No. 02 Desember 2020

ISSN: 2714-5204

## **Pembangunan Pedesaan Melalui Pendekatan Kebijakan *Local Economic Development* Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa**

Edi Irawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS

email: [edi.irawan@uts.ac.id](mailto:edi.irawan@uts.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The aim of this article is to study problems related to rural development and increase village competitiveness through a conceptual approach to Local Economic Development Policy. Local economic development policies and rural development can be strategic policies to support regional development including village competitiveness. This implementation can be achieved by institutionalizing economic clusters and strengthening institutional platforms. This is fundamental to do in the context of local economic development (LED) to increase village competitiveness, namely the preparation of a roadmap strategy, mentoring, participation, monitoring and evaluation of activities. Local economic development (LED) policies to increase village competitiveness can run effectively and efficiently if their implementation is based on the principles of local democracy.*

**Keywords:** *Local Economic Development*

### **ABSTRAK**

*Tulisan Ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang terkait tentang pembangunan pedesaan serta peningkatan daya saing desa melalui sebuah pendekatan konsep Kebijakan Local Economic Development. Kebijakan pembangunan ekonomi lokal dan pembangunan pedesaan dapat menjadi kebijakan strategis untuk mendukung pembangunan daerah termasuk daya saing desa. Implementasi ini dapat dicapai melalui kelembagaan klaster ekonomi dan penguatan platform kelembagaan. Hal ini mendasar perlu dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi lokal ( PEL) untuk meningkatkan daya saing desa adalah penyusunan strategi roadmap, pendampingan, partisipasi, monitoring dan evaluasi kegiatan. Kebijakan pembangunan ekonomi lokal (PEL) untuk meningkatkan daya saing desa dapat berjalan efektif dan efisien jika pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi lokal.*

**Kata Kunci:** *Pembangunan Ekonomi Lokal*

## I. Pendahuluan

Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan Desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; serta. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; (UU nomor 6 th 2014 pasal 4). Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki.

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mapu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus diseuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut BPS, jumlah desa dengan status tertinggal masih mendominasi dari jumlah seluruh desa Indonesia.

**Gambar 1. Jumlah Desa menurut Indeks Pembangunan Desa**



Sumber: LKPP, 2017 dan Kemenkue, 2018

Perkembangan Jumlah desa di Indonesia masih jauh dari katagori desa mandiri yang ini disebabkan oleh adanya proses pembangunan selama hanya berpusat pada kota dan melupakan pembangunan di pedesaan dengan tujuan hanya mengejar pembangunan dan pemerataan pembangunan sehingga hal tersebut berdampak pada ketimpangan antar wilayah. Praktek perencanaan pengembangan wilayah berdasarkan Konsep “Spatial Planning System”,

yang bersifat terpusat dan mengejar pertumbuhan perekonomian nasional, belum berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengatasi ketimpangan wilayah. Sifat eksploitatif dari praktek perencanaan pengembangan wilayah ini telah memperlemah kondisi wilayah belakang, demi mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Wilayah belakang telah berkorban untuk mengejar pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga dalam jangka panjang selain akan memperbesar ketimpangan wilayah, juga akan menimbulkan persoalan yang lebih berat, antara lain semakin merosotnya kualitas lokal kota maupun desa, kesenjangan sosial yang semakin melebar, semakin rusaknya kapasitas berpikir ke depan dan semakin merusak kehidupan pribadi dan keluarga (Malizia dan Feser, 2015, Blakely, 1989, Friedmann, 2015, Rogerson,

Oleh karena itu, paradigma pembangunan nasional harus diubah dengan menempatkan wilayah pedesaan sebagai motor pembangunan dan menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan yang berpartisipasi aktif dalam seluruh aspek pembangunan. Hal ini cukup beralasan mengingat pedesaan merupakan tulang punggung transformasi perekonomian suatu bangsa. Pedesaan memainkan peran sebagai penyedia berbagai macam surplus perekonomian yang dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri di kawasan perkotaan.

Pendekatan pembangunan yang digunakan selama ini telah membuat masyarakat pedesaan tidak mengalami kemajuan yang berarti (Pranadji dan Hastuti, 2004). Hal ini diindikasikan dengan tidak optimalnya organisasi ekonomi yang ada di desa. Organisasi - organisasi tersebut seperti lembaga perkreditan desa, koperasi desa, dan lumbung pendukuhan. Seharusnya organisasi ekonomi desa tersebut dapat tumbuh kuat dari bawah, mampu bertahan hidup dan mengembangkan diri dengan baik. Hampir semua organisasi ekonomi di pedesaan tersebut relatif rapuh. Kerapuhan ini diperkirakan menjadi salah satu sebab serius mengapa kehidupan dan perekonomian masyarakat pedesaan semakin terbelakang dan melemah (Pranadji dan Hastuti, 2004).

Banyak proyek/program pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Proyek/program tersebut dilakukan masing-masing departemen maupun antar departemen. Pada umumnya proyek-proyek yang digulirkan masih pada generasi pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Baik berupa sarana irigasi, bantuan saprotan, mesin pompa, pembangunan sarana air bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika proyek berakhir maka keluaran proyek tersebut sudah tidak berfungsi atau bahkan hilang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek tersebut antara lain, yaitu: (1) ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang diberikan (2) paket proyek tidak dilengkapi dengan ketrampilan yang mendukung (3) tidak ada kegiatan monitoring yang terencana (4) tidak ada kelembagaan di tingkat masyarakat yang melanjutkan proyek (PERHEPI, 2004).

Salah satu permasalahan yang menjadi tantangan bagi pembangunan di pedesaan adalah masalah daya saing desa. Sebagai tulang punggung transformasi perekonomian, daya saing desa merupakan akar dari daya saing daerah ditingkatkan lebih tinggi yaitu daya saing regional dan nasional. Daya saing desa yang kuat diyakini akan membuat daya saing regional dan nasional juga akan kuat. Apalagi peran desa sangat penting mengingat pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di pedesaan jauh lebih besar daripada penduduk miskin di kawasan perkotaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 15,72 persen, sedangkan di perkotaan hanya mencapai 9,23 persen (Badan Pusat Statistik, 2011). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan daya saing desa merupakan agenda penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pelaku kebijakan dan masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan fenomena-fenomena di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan pedesaan dan berbagai pengalaman kegagalan proyek pemerintah serta peningkatan daya saing desa yang

mampu memberdayakan ekonomi lokal melalui sebuah pendekatan konsep Kebijakan *Local Economic Development*. Dengan ini diharapkan akan ada sinergi antara pembangunan pedesaan yang menyeluruh dan mampu meningkatkan daya saing desa.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana membangun pedesaan serta peningkatan daya saing desa melalui sebuah pendekatan konsep Kebijakan *Local Economic Development*.

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan yang terkait tentang pembangunan pedesaan serta peningkatan daya saing desa melalui sebuah pendekatan konsep Kebijakan *Local Economic Development*.

## **II. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun kedalam lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data

## **III. Pembahasan**

### **3.1 Paradigma Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan**

Paradigma merupakan suatu yang penting menjadi dasar dalam upaya memahami secara mendalam masalah-masalah kehidupan yang dihadapi dan mengatasinya secara mendasar. Pada tahapan praktis tertentu, paradigma pembangunan juga dapat dipandang sebagai kesatuan teori, model, strategi dan sistem pengelolaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Nawawi, 2009). Berbeda dengan konsep pembangunan tradisional yang umumnya menganalogikan masalah pembangunan dengan “keterbelakangan” (paradigma modernisasi) dan atau “ketergantungan” (pada paradigma dependensia), sains baru melihat masalah itu sebagai akibat dari adanya tatanan yang mengalami stagnasi dan atau terisolasi dari lingkungannya (Amien, 2005).

Kondisi itu sering dialami oleh desa yang mengalami stagnasi daam pembangunan dan terisolasi dari pusat pembangunan. Dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota, perlu ada perubahan paradigma dalam melihat desa. Salah satunya menurut Zaini (2010) adalah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (base on village). Paradigma pembangunan mempunyai empat komponen esensial (Alhumami, 2005). Menurut Alhumami (2005) keempat komponen tersebut yaitu:

- a) Kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara.
- b) Produktivitas yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi.
- c) Pemberdayaan yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan, sehingga masyarakat memiliki kemandirian, otonomi, dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial.

- d) Berkelanjutan yang merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan seperti fisik, manusia, finansial, dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat.

Paradigma pembangunan manusia kini menjadi tema sentral dalam wacana perdebatan mengenai isu-isu pembangunan. Orientasi pembangunan pun bergeser dari sekadar mencapai tujuan makroekonomi seperti peningkatan pendapatan nasional dan stabilitas fiskal ke upaya memantapkan pembangunan sosial (*societal development*) (Alhumami, 2010). Paling kurang ada enam alasan mengapa paradigma pembangunan manusia ini bernilai penting, yaitu: (i) pembangunan bertujuan akhir meningkatkan harkat dan martabat manusia; (ii) mengemban misi pemberantasan kemiskinan; (iii) mendorong peningkatan produktivitas secara maksimal dan meningkatkan kontrol atas barang dan jasa; (iv) memelihara konservasi alam (lingkungan) dan menjaga keseimbangan ekosistem; (v) memperkuat basis *civil society* dan institusi politik guna mengembangkan demokrasi; dan (vi) merawat stabilitas sosial politik yang kondusif bagi implementasi pembangunan (Basu, 2002 dalam Alhumami, 2010).

Dengan melihat latar belakang pembangunan pedesaan yang telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Selain itu, pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Sebagai penekanan terakhir, pembangunan pedesaan bersifat multi aspek yang melibatkan keterkaitan antar bidang sektor dan aspek baik di dalam maupun di luar pedesaan (Adisasmita, 2006).

Tujuan pembangunan pedesaan dapat dilihat dari segi jangka panjang, jangka pendek dan tujuan pembangunan spasial (Adisasmita, 2006). Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam. Tujuan pembangunan pedesaan secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan yang holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera (Adisasmita, 2006).

### **3.2 Ruang Lingkup dan Prinsip Pembangunan Pedesaan.**

Menurut Adisasmita (2006) ruang lingkup pembangunan pedesaan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia, penciptaan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan, dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan), patisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (*sustainable*). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menetapkan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan.

### 3.3 Definisi Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Local Economic Development (LED).

Dalam konteks pembangunan wilayah terdapat beberapa kebijakan pengembangan yang terus berevolusi seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau dinamika permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar, kebijakan tersebut dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok, yaitu : (1) kebijakan pengembangan dari atas, (2) kebijakan pengembangan dari bawah dan (3) kebijakan Local Economic Development (Iqbal dan Anugrah, 2009). Pada dasarnya kebijakan-kebijakan tersebut saling melengkapi dan menyempurnakan menurut situasi, kondisi, dan permasalahan yang terjadi. Kebijakan pembangunan dari atas memiliki kelemahan karena dapat menimbulkan kesenjangan pada wilayah-wilayah yang lebih kecil akibat eksploitasi sumberdaya oleh wilayah yang lebih besar. Sementara itu, kebijakan pembangunan dari bawah sebetulnya memiliki muatan yang bagus tetapi seringkali lemah dalam implementasi, sehingga kebijakan ini cenderung bersifat utopia. Adapun kebijakan Local Economic Development (Blakely, 1994) dapat dianggap sebagai alternatif dalam mencari solusi permasalahan yang terjadi pada kebijakan pembangunan dari atas dan kebijakan pembangunan dari bawah.

Berkaitan dengan konsep Local Economic Development (LED) terdapat beberapa definisi dimana satu dan lainnya memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Canzanelli (2001) mendefinisikan Local Economic Development (LED) sebagai sebuah proses yang sesuai untuk menciptakan pertumbuhan tenaga kerja dan penciptaan perusahaan kecil dan menengah baru untuk mendukung pembangunan manusia dan pekerjaan yang layak. Menurut Blakely (1989) mendefinisikan Local Economic Development (LED) merupakan proses dimana pemerintah lokal atau organisasi berbasis masyarakat (lingkungan) mengelola sumberdaya yang ada dan melakukan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menstimulus aktivitas ekonomi. Tujuan prinsip Local Economic Development (LED) adalah untuk merangsang kesempatan kerja di sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggunakan sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan yang ada. Adapun menurut Zaaier and Sara (1993) dalam Rodriguez-Pose et.al (2005) mengartikan bahwa Local Economic Development (LED) adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan/ atau organisasi berbasis komunitas mengelola sumber daya yang ada dan melakukan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Dalam website Bank Dunia menyatakan bahwa Local Economic Development (LED) menawarkan kesempatan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga non profit, dan masyarakat lokal untuk melakukan kerja sama dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal. Local Economic Development (LED) berfokus pada peningkatan daya saing, meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja dan memastikan bahwa pertumbuhan yang inklusif. Local Economic Development (LED) mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk perencanaan fisik, ekonomi dan pemasaran. Local Economic Development (LED) juga banyak mencakup pemerintah daerah dan fungsi sektor swasta termasuk perencanaan lingkungan, pengembangan usaha, penyediaan infrastruktur, pengembangan real estate dan keuangan (Tello, 2010).

Dalam literatur ekonomi dan sudut pandang ekonomi industri, Local Economic Development (LED) secara tradisional didefinisikan sebagai perubahan yang mempengaruhi kapasitas perekonomian lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan kesempatan kerja dan menciptakan kesejahteraan baru untuk penduduk lokal (Blair, 1995; Bartik, 1995; Bingham and Mier, 1993; and Malizia, 1985 dalam Tello, 2010). Definisi sentral dari Local Economic Development (LED) diberikan oleh Blakely (2003) dan Blakely dan Bradshaw (2002) dalam Tello (2010) yang menyatakan bahwa area Local Economic Development (LED) merupakan kombinasi antara beberapa disiplin ilmu dan perpaduan

antara kebijakan dan praktek. Konsep Local Economic Development (LED) didasarkan pada empat faktor utama yaitu sumberdaya asli daerah dan pengawasan lokal, formasi kesejahteraan baru, capacity building yang baru, dan ekspansi sumberdaya. Tujuan dari Local Economic Development (LED) adalah untuk membangun kapasitas ekonomi lokal untuk meningkatkan masa depan perekonomian dan kualitas hidup semua komponen yang ada di dalamnya. Local Economic Development (LED) adalah proses dimana masyarakat, bisnis dan mitra non-pemerintah dari seluruh sektor bekerja secara kolektif untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Keberhasilan sebuah komunitas hari ini tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan ekonomi pasar lokal, nasional dan internasional yang dinamis. Strategi LED yang direncanakan semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal suatu daerah, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan produktifitas dan daya saing bisnis lokal, pengusaha dan pekerja.

### **3.4 Kebijakan Local Economic Development (LED).**

Proses Local Economic Development (LED) merupakan proses jalinan kepentingan antara pemerintah, swasta, produsen, dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lokal (endogenous development) dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Blakely, 1991 dalam Iqbal dan Anugrah, 2009). Dalam proses Local Economic Development (LED) terkandung beberapa misi kegiatan seperti pengembangan usaha dan ekonomi daerah, wahana partisipasi masyarakat, pemberdayaan produsen atau masyarakat, pengentasan kemiskinan, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama regional yang bersifat lintas sektoral (Alizar et al., 2002 dalam Iqbal dan Anugrah, 2009).

Program Local Economic Development (LED) merupakan suatu kebijakan ekonomi daerah yang secara umum terfokus pada sektor-sektor pengungkit yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan sistem perekonomian daerah. Tujuan dari program Local Economic Development (LED) adalah memberikan dorongan utama (prime mover) pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Pendekatan Local Economic Development (LED) menggunakan tiga prinsip utama yaitu (1) sektoral yang menandakan adanya sinergitas kebijakan/ prioritas pembangunan pusat dan daerah, (2) kewilayahan, dimana pemerintah menetapkan Program RED – SP (Regional Economic Development Strategic Program) melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), pengembangan klaster dan penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, dan (3) partisipatif, artinya terdapat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi lain (Bappeda Jawa Tengah, 2011).

Alizar et al. (2002) dalam Iqbal dan Anugrah (2009) menekankan bahwa dalam implementasinya Local Economic Development (LED) perlu diwujudkan dalam kemitraan. Kemitraan menjadi penting dan mendasar dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya suatu daerah, mengingat pemerintah sendiri memiliki keterbatasan (terutama dana) sehingga memerlukan kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan diperlukan dalam rangka menggelar dialog partisipatif antar pemangku kepentingan (stakeholders) tentang pengembangan ekonomi. Melalui forum kemitraan, hal-hal yang terkait dengan kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan, fasilitasi pelayanan, dan formulasi keputusan dibuat dan didiskusikan. Selain itu, akselerasi Local Economic Development (LED) juga memerlukan strategi “klaster ekonomi” untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendapatan (livelihood). Kondisi ini dapat dicapai melalui identifikasi peluang dan pengembangan pasar, diversifikasi, dan pemasaran berbagai komoditas terpilih (unggulan). Kedua, strategi “forum.

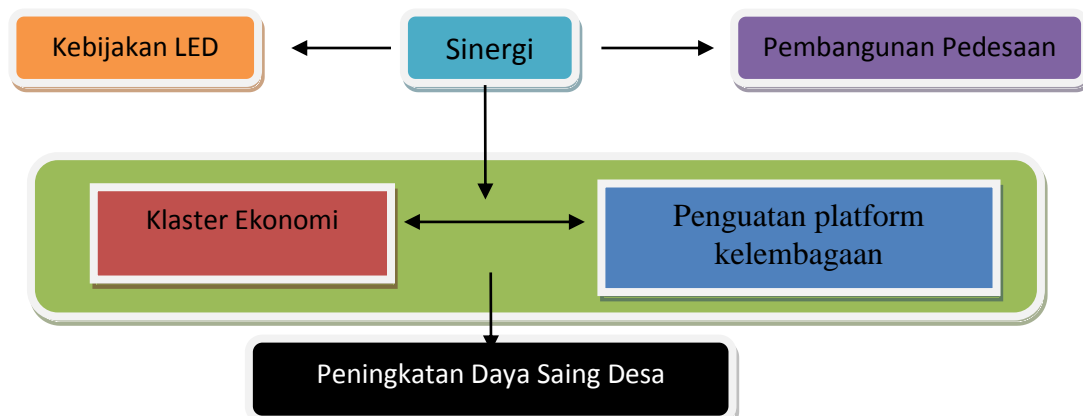
Berdasarkan gambaran tersebut, klaster ekonomi dan forum kemitraan merupakan dua kunci pokok dalam kebijakan Local Economic Development (LED). Secara konkret, Local

Economic Development (LED) diimplementasikan dalam beberapa langkah dengan tujuan dan target/sasaran kegiatan yang hendak dicapai. Secara garis besar, langkah kegiatan Local Economic Development (LED) diawali dari proses sosialisasi, fasilitasi, hingga rekayasa kelembagaan. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran di antara para pemangku kepentingan, mobilisasi sumberdaya dalam wacana kemitraan, hingga pengembangan kelembagaan yang berdayaguna dalam jangka panjang. Sementara itu, target dan sasaran Local Economic Development (LED) harus sejalan dengan langkah dan tujuannya yaitu mulai dari timbulnya kesadaran para pemangku kepentingan terhadap eksistensi Local Economic Development (LED), termobilisasinya sumberdaya sesuai dengan kebutuhan, hingga terlembaganya (institutionalized) LED.

### 3.5 Sinergi Kebijakan Local Economic Development dan Pembangunan Pedesaan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing.

Sinergi kebijakan *Local Economic Development* (LED) dan Pembangunan Pedesaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana tertera pada Gambar

1. Dalam hal ini perlu dibentuk rekayasa kelembagaan yang sejalan dengan dua strategi pokok kebijakan *Local Economic Development* (LED), yaitu kluster ekonomi dan forum kemitraan.



Gambar 2. Pendekatan Kebijakan LED dan Pembangunan Pedesaan sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing

### 3.6 Kluster Ekonomi

Kluster ekonomi merupakan sekumpulan usaha atas produk barang/jasa tertentu dalam suatu wilayah, yang membentuk kerjasama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Bappeda Jawa Tengah, 2011). Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut dalam kluster harus menunjukkan kesatuan hubungan aktivitas khusus antara berbagai perusahaan (companies), pemasok (suppliers), jasa pelayanan (service providers), dan institusi kelembagaan (associated institutions) yang terkonsentrasi secara geografis pada suatu wilayah baik regional maupun nasional (Porter, 1990 dalam Iqbal dan Anugrah, 2009). Oleh karena itu, kluster merupakan elemen penting dalam perumusan kebijakan ekonomi, stabilisasi ekonomi makro, privatisasi, peluang pasar, dan bisnis.



Batasan kluster ekonomi menurut definisi tersebut relatif komprehensif atau utuh karena kluster dapat dijabarkan kedalam alur input, proses dan output atau hasil dari pengembangan kluster secara jelas. Input dalam kluster terdiri dari sekumpulan usaha atas produk/jasa tertentu sebagai usaha industri inti, usaha pendukung (industri pendukung dan lembaga pendukung), dan usaha terkait seperti usaha yang bisa dikerjasamakan dengan usaha inti diluar usaha pendukung. Menurut prosesnya, kluster ekonomi merupakan kerjasama yang mampu menciptakan efisiensi kolektif. Usaha inti saling berhubungan secara intensif dan membentuk kemitraan dengan industri pendukung dan usaha terkait dengan didukung oleh jasa-jasa/prasana pendukung. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, menciptakan aset secara kolektif, dan meningkatkan inovasi sehingga bermanfaat untuk mendorong spesialisasi produk (bahkan proses) dan mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Dalam output yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan terakhir dari penetapan kebijakan kluster bukan hanya untuk kemajuan dunia usaha tetapi juga masyarakat secara luas akan diuntungkan antara lain melalui tersedianya produk/jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan bahan baku lokal dan terjaganya keseimbangan lingkungan sekitar. Dengan demikian kluster juga akan menjaga tiga pilar keberhasilan dunia usaha, yang dikenal dengan sebutan 3P yaitu profit (keuntungan), people (kesejahteraan), dan planet (lingkungan).

Berdasarkan implementasinya, kluster ekonomi paling tidak mengandung tiga unsur, yaitu : (1) kedekatan geografis, mencakup kegiatan lintas komoditas dan lintas sektoral; (2) kesatuan sektor industri, meliputi kegiatan lintas daerah dan komoditas; dan (3) kesamaan komoditas yang berkaitan dengan kegiatan lintas daerah. Dalam kluster ekonomi terkandung beberapa prinsip (OECD, 1998 dalam Iqbal dan Anugrah, 2009). Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Skala ekonomi (economic scale) – berorientasi regional, bukan bersifat pendekatan tunggal terhadap komunitas atau institusi tertentu (not a single community or jurisdiction).
- b. Tantangan ekonomi (economic challenge) – menjawab tantangan kebutuhan restrukturisasi ekonomi dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan masukan (input) ekonomi.
- c. Titik tumpu ekonomi (economic focus) – memiliki visi berorientasi pengembangan kelompok kluster regional (regional cluster portfolio), bukan hanya semata mengembangkan industri atau perusahaan tertentu.
- d. Kepemimpinan dan proses strategi (leadership and strategy process) memiliki pimpinan dan organisasi yang peduli terhadap pengembangan ekonomi regional melalui proses pendekatan komprehensif dan kolaboratif terhadap aneka bentuk industri dan institusi.
- e. Kapasitas dalam mengambil tindakan (capacity to take action) – mengambil tindakan secara regional melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya teknis dan keuangan dengan tujuan memperoleh manfaat buat kepentingan bersama.

Dalam pembangunan pedesaan, kluster dapat dikategorikan sebagai hubungan interdependensi antara wilayah desa itu sendiri dan daerah sekitarnya (termasuk perkotaan). Oleh karena itu, kluster yang hendak dibentuk seyogianya sejalan dengan kebijakan Local Economic Development (LED). Langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal, analisis, penetapan produk unggulan dan kesepakatan kluster, penyusunan rencana tindak dan bisnis kluster, dan pengembangan kluster.

Identifikasi dan pemetaan kondisi ekonomi lokal ditujukan untuk mengidentifikasi potensi lokal, faktor-faktor pendukung, serta lingkungan strategis yang diperlukan sebagai

pengungkit pengembangan kluster dan produk unggulan. Identifikasi kluster juga harus merefleksikan potensi-potensi yang berkaitan dengan permintaan pasar, perekonomian, manfaat bagi rumah tangga miskin, dampak berganda bagi perekonomian, dan keberhasilan. Pendekatan yang paling representatif untuk mengetahui potensi-potensi tersebut adalah melalui kegiatan penelitian. Kegiatan pemetaan kondisi ekonomi lokal ini dapat menggunakan pendekatan model Rapid Appraisal Techniques for Local Economic Development (RALED) Bappenas yang diperkaya dengan analisis pengaruh Local Economic Development (LED) terhadap pembangunan daerah.

Analisis kluster dilakukan dalam usaha untuk mengidentifikasi dan menentukan produk unggulan daerah. Kriteria utama penentuan produk unggulan ini adalah produk yang memiliki nilai tambah yang besar, memiliki multiplier usaha lokal yang luas, serta memiliki daya saing dalam bisnis usaha domestik maupun internasional. Untuk menggali informasi multiplier effect dan nilai tambah usaha setiap produk lokal dilakukan analisis value chain proses produksi masing-masing produk usaha. Selain itu, analisis kluster juga harus mengacu pada konsep yang melandasinya. Konsep dan implementasi analisis kluster meliputi : (1) orientasi pasar dengan fokus pada mekanisme efektifitas penawaran dan permintaan; (2) inklusif dengan cakupan kegiatan fasilitasi lembaga ekonomi terkait; (3) kerjasama dalam solusi permasalahan secara kolaboratif and partisipatif; (4) strategis dalam rangka memotivasi dedikasi kerja para pemangku kepentingan; dan (5) nilai tambah bagi pendapatan lokal (Iqbal dan Anugrah, 2009). Kelima konsep dan implementasi analisis kluster tersebut merupakan pengejawantahan dari hasil identifikasi dan pemilihan kluster sebagaimana telah diuraikan di atas.

Setelah analisis kluster, langkah berikutnya adalah penetapan dan kesepakatan kluster berdasarkan produk unggulan daerah dapat berupa beberapa produk dan kluster usaha yang berpotensi paling baik dan memiliki daya saing usaha untuk mendukung Local Economic Development (LED) di daerah. Untuk mendukung pengembangan kluster, diperlukan rencana tindak dan bisnis kluster terdiri dari program prioritas strategis yang dilakukan dalam rangka mendukung fokus kegiatan pengembangan kluster dan produk unggulan daerah. Setelah itu baru dilakukan pengembangan kluster. Langkah-langkah pengembangan kluster mencakup : (1) mobilisasi para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengembangan minat dan partisipasi; (2) diagnosis atau penilaian kluster dalam hubungannya dengan ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian; (3) strategi kerjasama dalam bentuk pengorganisasian perusahaan di setiap kluster; dan (5) implementasi berupa pengembangan dedikasi peserta kelompok kerja kluster dan para pemangku kepentingan.

### **3.7 Penguatan platform kelembagaan.**

Dalam konsep Local Economic Development (LED), forum kemitraan mewadahi terjalannya hubungan tanggungjawab antara pemerintah (aparatur dan wakil rakyat), swasta (perusahaan, lembaga keuangan, pedagang, dan produsen), dan masyarakat (warga komunitas, LSM, dan lembaga pendukung lainnya) dalam suatu forum (Alizar et al., 2002 dalam Iqbal dan Anugrah, 2009). Forum kemitraan dapat dikejawantahkan dalam penyiapan dan penguatan platform kelembagaan. Kelembagaan dari forum kemitraan dilakukan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sistem kelembagaan yang sudah berjalan. Inisiasi awal dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun institusi lain untuk mendorong terciptanya kelembagaan. Forum kemitraan yang terdiri dari lintas pelaku ini diperlukan untuk mengawal dan mendukung aktivitas dari kluster ekonomi yang sudah dibentuk. Kelembagaan ini dapat terdiri dari lembaga yang berfungsi melakukan eksekusi kegiatan seperti Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), kelompok pelaku usaha, kelompok penunjang usaha, Business Development Services (BDS). Mengingat beragamnya pemangku kepentingan, maka hal paling mendasar yang perlu dilakukan dalam forum kemitraan adalah penilaian (assessment) terhadap eksistensi dan aspirasi pemangku kepentingan. Metode yang cukup representatif

dalam penilaian terhadap eksistensi dan aspirasi pemangku kepentingan tersebut adalah analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis).

Race dan Millar (2006) dalam Iqbal dan Anugrah (2009) menekankan bahwa paling tidak ada tiga elemen penting dalam analisis pemangku kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian. Ketiga elemen tersebut adalah : (1) pemangku kepentingan itu sendiri yaitu baik perorangan maupun kelompok; (2) partisipasi (keterlibatan); dan (3) keterkaitan (engagement) sebagai bentuk dari partisipasi yang tidak hanya bernuansa konsultasi semata. Oleh karena itu, dalam analisis pemangku kepentingan perlu dipahami alur lingkaran operasionalisasi kegiatan (dalam hal ini forum kemitraan) mengingat eksistensi lembaga ini memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang cukup majemuk dan dinamis.

Implementasi analisis pemangku kepentingan dilandasi empat aspek pokok, yakni identifikasi, pemahaman persepsi, penyediaan informasi, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Neef (2005) dalam Iqbal dan Anugrah (2009) menggarisbawahi bahwa identifikasi pemangku kepentingan perlu dilakukan dalam rangka menghindari metode diagnostik jangka pendek, mematuhi kode etik pekerjaan, dan membuat keseimbangan minat dan perhatian antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis, diperlukan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara partisipatif. Hasil identifikasi memuat tanggungjawab, keragaan, dan indikator risiko dalam kaitannya dengan peran dan tugas pemangku kepentingan. Peran dan tugas tersebut diimplementasikan dalam wacana kegiatan kelompok (forum kemitraan) bukan berbasis individu. Hal demikian penting dalam rangka menghindari variasi heterogenitas antar pemangku kepentingan.

Persepsi pemangku kepentingan perlu diketahui dalam kaitannya dengan integrasi peran dan tugas, mengingat persepsi pemangku kepentingan berbeda antara satu dengan lainnya baik individu maupun kelompok. Perbedaan persepsi tersebut dapat berupa pandangan terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan upaya promosi yang dilakukan pihak eksternal (Iqbal dan Anugrah, 2009). Oleh karena itu, dengan diketahuinya persepsi pemangku kepentingan akan dapat distimulus elemen-elemen penting untuk memotivasi komitmen pemangku kepentingan dalam akselerasi kegiatan forum kemitraan. Hal ini adalah proses dalam rangka integrasi tugas dan peran pemangku kepentingan dalam suatu aksi kolektif.

Penyediaan informasi seyogianya berbasis kebutuhan (needs). Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan Ballit et al. (1997) dalam Iqbal dan Anugrah (2009), penyediaan informasi lebih bersifat permintaan (demand-driven) dibandingkan penawaran (supply-driven). Disamping itu, selain penyediaan informasi, unsur lainnya yang perlu diperhatikan adalah pelatihan (training). Melalui pelatihan, pemangku kepentingan difasilitasi dengan pengetahuan berupa kerangka dasar dalam menciptakan dan sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap eksistensi forum kemitraan. Pelatihan bisa meliputi aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, teknis ketatalaksanaan, pengembangan inovasi, aksesibilitas terhadap sumberdaya, dan aspek sosial ekonomi lain yang pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan dampak ganda (multiplier effect) melalui determinasi spesifik lokasi (Aggrawal, 2002 dalam Iqbal dan Anugrah, 2009).

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek krusial dalam melihat perkembangan kegiatan dan bahan masukan untuk umpan balik perbaikan dan penyempurnaan forum kemitraan. Menurut Gonsalves et al. (2005) dalam Iqbal dan Anugrah (2009), monitoring dan evaluasi semestinya berlandaskan prinsip partisipatif (participatory monitoring and evaluation). Implementasinya, kriteria dan indikator kegiatan dirancang secara kolektif oleh semua pemangku kepentingan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan relevansi atau kesesuaian (Vernooy, 2005 dalam Iqbal dan Anugrah, 2009).

### **3.8 Peningkatan Daya Saing Desa Berbasis Kebijakan Local Economic Development.**

Secara teoritis, sinergi kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa akan terwujud apabila identifikasi dan analisis klaster ekonomi serta pembentukan forum kemitraan berjalan sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diuraikan di atas. Akan tetapi, implementasinya memerlukan kesamaan persepsi dan jalinan komitmen berikut konsolidasi dalam bentuk kolektifitas perencanaan dan keputusan partisipatif antar para pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu disusun langkah strategi (road map strategy) guna menjembatani dan sekaligus merealisasikan sinergi kebijakan tersebut.

Paling tidak ada lima langkah strategi kebijakan yang perlu diupayakan dalam mewujudkan implementasi sinergi kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa. Kelima langkah strategi tersebut adalah penyiapan dan penguatan platform kelembagaan, pemetaan dan analisis kondisi klaster ekonomi desa, penyusunan rencana tindak dan rencana bisnis, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Penyiapan dan penguatan platform kelembagaan diperlukan sebagai fondasi awal berjalannya sinergi kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa. Kelembagaan yang terbentuk merupakan pelaksana, pendamping, supervisi dan pengevaluasi program yang ada. Kelembagaan tersebut juga diperlukan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi penting dilakukan dalam rangka mengenalkan sinergi kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing, terutama bagi kalangan para pemangku kepentingan. Konkretnya sosialisasi dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan atau dengan memanfaatkan media komunikasi teknologi informasi.

Pemetaan dan analisis kondisi klaster ekonomi desa diperlukan untuk mendapatkan produk unggulan desa yang akan dijadikan klaster dan menjadi prime over bagi perekonomian desa tersebut. Untuk mengoptimalkan keberadaan klaster produk unggulan desa tersebut, maka diperlukan rencana tindak dan rencana bisnis klaster yang dapat dijadikan arahan dalam implementasinya. Implementasi dan pengawalan sinergi kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa dilakukan oleh forum kemitraan yang dalam hal ini kelembagaan yang terbentuk. Klaster usaha menjalankan rencana bisnis (Businesss Plan) yang telah disusun, dengan didukung perangkat antara lain sekurangnya adalah Forum Rembuk Klaster (FRK) sebagai media dialog dan kesepakatan antar pelaku usaha dan perangkat pendukungnya untuk menjalankan Businesss Plan, Business Development Services (BDS) bertindak sebagai manajer usaha dan fasilitator klaster yang melakukan kegiatan pengawalan bisnis dan non bisnis, koperasi sebagai perangkat bisnis Forum Rembuk Klaster (FRK), dan unit-unit pendukung usaha klaster lainnya (pengembangan teknologi, dan lainnya) yang dapat berupa yayasan/sub kelompok di dalam koordinasi Forum Rembuk Klaster (FRK).

Kegiatan monitoring dilakukan dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan sinergi kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa oleh kelembagaan yang sudah terbentuk sebelumnya. Kegiatan evaluasi ditujukan untuk menilai kinerja pelaksanaan sinergi kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing desa, serta perangkat pendukungnya dalam rangka untuk merumuskan perbaikan program dan penguatan perangkat pelaksana program tersebut. Dalam melakukan evaluasi diperlukan penyusunan perangkat pemantauan program. Model pemantauan dan evaluasi ini salah satunya memasukkan variabel daya saing sebagai kriteria outcome keberhasilan dari program tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan sebagai upaya melakukan

inovasi dan pengembangan metode pendekatan terus dilakukan dalam rangka perbaikan program dan strategi kebijakan dalam fase/ siklus berikutnya.

### **3.9 Daya Saing dan Daya Saing Desa**

Konsep daya saing muncul akibat dari kondisi persaingan yang ada dalam perekonomian. Persaingan terjadi antar pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan bagi perusahaan adalah berupa laba, sedangkan untuk suatu daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Konsep daya saing daerah ini semakin berkembang, dari daya saing nasional dari Michael Porter (1990) menuju daya saing internasional dari Dong-Sung Cho (2000). Bahkan penerapan konsep daya saing ini diterapkan juga dalam perencanaan daya saing daerah (Bappeda Jawa Tengah, 2012). Melalui program One Village One Product (OVOP), konsep daya saing saat ini sudah diaplikasikan pada tingkat desa.

Konsep daya saing nasional dari Michael Porter ditentukan oleh empat faktor penentu daya saing. Keempat faktor penentu daya saing tersebut dikenal dengan Diamond Porter. Penentu daya saing menurut Porter (1990) dalam yaitu kondisi faktor, strategi perusahaan, struktur, dan persaingan, kondisi permintaan, dan industri terkait dan industri pendukung (Moon dan Cho, 2000).

Dengan memperluas model Diamond Porter, Dong-Sung Cho (2000) mengemukakan sembilan faktor yang menentukan daya saing. Penentu daya saing tersebut terdiri dari delapan unsur dari faktor internal dan satu unsur dari faktor eksternal. Adapun delapan unsur dari faktor internal terdiri dari empat unsur dari faktor fisik dan empat unsur dari faktor manusia. Faktor internal terdiri dari sumber daya alam yang dimiliki (endowed resources), lingkungan bisnis, industri terkait dan pendukung, permintaan domestik mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, pekerja, politisi dan birokrasi, wirausahawan, swerta para manajer dan professional. Adapun faktor eksternal adalah peristiwa dan peluang yang mencakup terobosan yang tidak diharapkan, fluktuasi pasar modal, gerakan permintaan internasional, pecahnya perang, dan lain-lain (Moon dan Cho, 2003)

## **IV. Kesimpulan Dan Saran**

Kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dapat dianggap sebagai kebijakan strategis menunjang percepatan pembangunan wilayah, termasuk di dalamnya adalah peningkatan daya saing desa. Implementasi sinergi tersebut dapat ditempuh melalui rekayasa kelembagaan klaster ekonomi dan forum kemitraan. Klaster ekonomi dibentuk melalui proses identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal, analisis, penetapan produk unggulan dan kesepakatan klaster, penyusunan rencana tindak dan bisnis klaster, dan pengembangan klaster. Sementara itu, forum kemitraan merupakan wadah organisasi dalam rangka memudahkan proses interaksi dan integrasi antar pemangku kepentingan berlandaskan prinsip kesamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas. Hal mendasar yang perlu dilakukan dalam kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya peningkatan daya saing adalah penyusunan langkah strategi (road map strategy), fasilitasi, partisipasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

Agar kebijakan Local Economic Development (LED) dan pembangunan pedesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara efektif dan efisien, implementasinya diupayakan bertumpu pada prinsip demokrasi daerah setempat (locally democratic principle). Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, sinergi kebijakan tersebut seyogianya diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Langkah operasionalnya dapat ditempuh melalui rancangan dan implementasi kebijakan peraturan daerah (Perda) yang disosialisasikan dan mendapat dukungan dari semua pihak khususnya para pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, fungsi dan peran pemerintah pusat lebih bersifat sebagai

koordinator dan fasilitator dalam rangka memacu pembangunan wilayah dan selanjutnya direplikasikan antar wilayah dalam kerangka pembangunan nasional.

## V. Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amien AM. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta (ID): Gramedia.
- Alhumami, Amich. 2005. *Evolusi Pemikiran Pembangunan*. Direktorat Agama dan Pendidikan, Bappenas .
- Bappeda Jawa Tengah. 2011. "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Jawa Tengah. Semarang " : *Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah*.
- Badan Pusat Statistik, 2011
- Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*. Second edition. California: SAGE Publication
- Canzanelli, Giancarlo. 2001. Overview and learned lessons on Local Economic Development, Human Development, and Decent Work. Working papers: Universitas. Available downloaded at: <http://www.ilo.org/public/english/universitas/download/publi/led1.pdf>. Diakses tanggal 27 November 2020 Pukul 06:16.
- Cho, Dong-Sung dan Moon, Hwy-Chang. 2000. National Competitiveness: A Nine-Factor Approach and Its Empirical Application. *Journal of International Business And Economy*. Fall 2000: 17 – 38.
- Cho, Dong-Sung dan Moon, Hwy-Chang. 2003. From Adam Smith to Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Iqbal, Muhammad dan Iwan Setiajie Anugrah. 2009. Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 7 No. 2 Juni 2009 : 160 – 188.
- Friedmann ,J, 2015: *Empowerment. The Politics of Alternative Development*, Blackwell Publisher, Cambridge, Massachusetts.

- Lexi.J.Moleong. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- LKPP, 2017 dan Kemenkue, 2018 Tentang Desa menurut Indeks Pembangunan Desa
- Malizia, E.E. and Feser, E.J., 1999: Understanding Local Economic Development, Center for Urban Policy Research, New Brunswick.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M., 2016, Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- PERHEPI. 2004. Pembangunan Pedesaan: Rekonstruksi Kelembagaan. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia.
- Pranadji, Tri dan Hastuti, Endang Lestari. 2004. Transformasi Sosio-Budaya dalam Pembangunan Pedesaan. AKP 1. Volume 2 No.1, Maret 2004: 77 – 92.
- Nawawi, I. 2009. Pembangunan dan Problema Masyarakat. Surabaya (ID): Putra Media Nusantara
- Rodriguez-Pose, Andres dan Sylvia Tijmstra. 2005. Local Economic Development as an alternative approach to economic development in Sub-Saharan Africa. A report for the World Bank. Available be downloaded at: <http://siteresources.worldbank.org/INTLED/Resources/339650-1144099718914/AltOverview.pdf>. Diakses tanggal 7 November 2020 Pukul 16:00.
- Rogerson, C.M., 2015: Local Economic Development Planning in The Developing Worl, Regional Development Dialog, 16, V – XV.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- UU nomor 6 th 2014 pasal 4 Tentang Desa
- Tello, Mario D. 2010. From National to Local Economic Development: Theoretical Issues. Cepal Review 102, Desember 2020.
- Zaini AHF. 2010.Pembangunan Pedesaan. Sumber: [http://www.kemenegpdt.go.id/uploads/artikel/Pembangunan\\_Pedesaan.pdf](http://www.kemenegpdt.go.id/uploads/artikel/Pembangunan_Pedesaan.pdf) [Diakses 10 November 2020]